

**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah selesai disusun. Rencana kerja tahun 2025 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2025. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja tahun 2025 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



I Made Subagia, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Dinas Pertanian merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2025 yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Tabanan. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pertanian masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja Dinas Pertanian. Penyusunan Renja Dinas Pertanian merupakan tanggung jawab masing-masing kepala Dinas Pertanian yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu Dinas Pertanian membentuk tim penyusun Renja Dinas Pertanian yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penyusunan RKA- OPD. Diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan OPD secara berkelanjutan.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian nantinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.

2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2025.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
- n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
 - o. Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
 - q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);
 - r. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2025 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
- Analisis pelayanan OPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Rivew terhadap rancangan awal RKPD
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Garis besar isi Rencana Kerja dan kegiatan Masyarakat:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi tahun 2022	Target Tahun 2025	Akhir Renstra
1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	86,90%	100%	100%
2.1	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Padi (6,14%) Jagung (15,47%) Kedelai: 61,77%	10%	10%
2.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Padi: (7,6%) Jagung: (19,1%) Kedelai (2%) Perkebunan : 6,57 %	10%	10%
2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	98,15%	99%	100%
2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	100%	60%	65%

Sumber: Data diolah

Analisis hasil capaian kinerja program menurut hasil LKjIP Tahun 2022

1. Meningkatkan Produksi hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Produksi padi tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021. Dengan persentase peningkatan produksi sebesar 6,14%. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya seperti jagung dan kedelai. Keduanya mengalami

peningkatan produksi. Dimana jagung meningkat sebesar 15,47 persen dan kedelai meningkat sebesar 61,77 persen. Hal ini karena sepanjang tahun 2022 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.400 Ha. Dengan rincian: - Kecamatan Selemadeg seluas 414 Ha, - Kecamatan Selemadeg Timur 1.226 Ha, Komoditas Pertanian Produksi Tahun 2021 (ton) Produksi Tahun 2022 (ton) Persentase Peningkatan Produksi(%) Padi 197.933 210.095 6,14 Jagung 12.713 14.680 15,47 Kedelai 395 639 61,77 28 - Kecamatan Kerambitan 511 Ha , - Kecamatan Tabanan 42 Ha, - Kecamatan Kediri 39 Ha, - Kecamatan Marga 53 Ha, - Kecamatan Baturiti 115 Ha, swadaya 23 Ha. Proyek tanam kedelai seluas 388 ha dengan rincian: - Kecamatan Kerambitan 35 Ha, - Kecamatan Tabanan 20 Ha, - Kecamatan Kediri 237 Ha, - Kecamatan Marga 13 Ha , - Kecamatan Baturiti 8 Ha, - Kecamatan Penebel 75 H

2. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2022 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.400 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 388 ha dan proyek bawang merah seluas 52 Ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat. Jagung mengalami penurunan produktivitas karena adanya perubahan standar perhitungan yang dulunya menggunakan tongkol basah, untuk tahun 2022 menggunakan satuan pipil kering. Hal ini karena adanya permintaan dari Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk menyamakan satuan ke pipil kering untuk memudahkan perhitungan. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan 32 sumber lemak, mineral, dan vitamin serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu. Untuk produktivitas komoditas kedelai, produktivitas mengalami peningkatan karena adanya bantuan pemerintah, penggunaan benih bermutu, pembuatan saluran drainase, pengaturan populasi, pengendalian OPT, pengolahan lahan yang baik dan pemupukan sesuai kebutuhan. produktivitas komoditas perkebunan mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang kurang mendukung, kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Hanya komoditas kopi arabika dan aren yang produktivitasnya mengalami peningkatan. Bahkan kopi arabika peningkatan produktivitasnya jauh melebihi tahun sebelumnya. Kakao mengalami peningkatan produktivitas, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan, hal ini karena iklim yang tidak mendukung, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang 35 telah dilakukan antara lain dengan

mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain: - Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao - Pengawasan dan pendampingan - Pengendalian OPT dan penerapan PHT - Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan - Indikasi geografis - Pemberdayaan petugas pengamat OPT - Agroindustri komoditi kakao - Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar - Pembinaan usaha komoditi kakao - Sistem jaminan mutu - Melakukan promosi

3. Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Dari sasaran Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan indikator persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan. Arahan dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Satgas PMK bahwa sebelum pelaksanaan G20 tanggal 13 November 2022 pelaksanaan cakupan vaksinasi PMK sudah mencapai 80% pada hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan babi).

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 2.2 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HASIL VAKSINASI				Cakupan (%)
		ANJING	KUCING	MONYET	TOTAL VAKSINASI	
Baturiti	6674	0	0	0	0	0,00
Kediri	10485	0	0	0	0	0,00
Kerambitan	7120	0	0	0	0	0,00
Marga	5818	902	0	0	902	15,50
Penebel	7385	0	0	0	0	0,00

Pupuan	7766	119	0	0	119	1,53
Selemadeg	5415	123	0	0	123	2,27
Selemadeg Barat	6879	169	0	0	169	2,46
Selemadeg Timur	4600	182	0	0	182	3,96
Tabanan	8765	0	0	0	0	0,00
TOTAL	70.907	1.495	0	0	1.495	2,11

Sumber: Statistik Peternakan

2.3 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Keterangan	Jumlah Vaksinasi (ekor)
Pelayanan kesehatan hewan dan spraying	1.534
Vaksinasi Sapi	39.509
Vaksinasi Babi	26.888
Vaksinasi kambing	523
Vaksinasi Rabies	1.495
Total Pelayanan kesehatan Hewan	69.949 ekor
Total Populasi Ternak	71.262 ekor
Persentase pelayanan Kesehatan Hewan	98,16%

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 2.4 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2021 ekor	2022 ekor	
1	Sapi	39.329	38.729	Turun 1,5 %
2	Kerbau	59	49	Turun 20,4 %
3	Kuda	11	0	Turun 100 %
4	Babi	22.681	44.304	Naik 48,8 %
5	Kambing	1.754	4.296	Naik 59,2 %
6	Ayam Buras	284.393	261.613	Turun 8,7 %
7	Ayam Ras Petelur	852.863	836.200	Turun 1,9 %
8	Ayam Ras Pedaging	2.144.908	2.224.683	Naik 3,6 %
9	Itik	57.111	51.255	Turun 11,4%

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 2.5 Rincian Kasus Positif Rabies Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Spesies	Tanggal Kasus
-----	-----------	------	---------	---------------

1	Pupuan	Pajahan	Anjing	07/01/2023
2	Selemadeg	Antap	Anjing	07/01/2023
3	Tabanan	Sudimara	Anjing	16/01/2023

Sumber: Statistik Peternakan

Secara umum faktor yang dirasa menghambat antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

- Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
- Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
- Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
- Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2022 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel:

Tabel 2.6 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan

NO	TAHUN	JUMLAH SKKH	JUMLAH BAP	KETERANGAN
----	-------	-------------	------------	------------

1	Jumlah 2022	8	268	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
2	Jumlah 2021	0	263	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
3	Jumlah 2020	716	110	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.7 Data Populasi ternak Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2021 ekor	2022 ekor	
1	Sapi	39.329	38.729	Turun 1,5 %
2	Kerbau	59	49	Turun 20,4 %
3	Kuda	11	0	Turun 100 %
4	Babi	22.681	44.304	Naik 48.8 %
5	Kambing	1.754	4.296	Naik 59,2 %
6	Ayam Buras	284.393	261.613	Turun 8,7 %
7	Ayam Ras Petelur	852.863	836.200	Turun 1,9 %
8	Ayam Ras Pedaging	2.144.908	2.224.683	Naik 3,6 %
9	Itik	57.111	51.255	Turun 11,4%

Sumber: Statistik Peternakan

Beberapa Alasan Penurunan populasi ternak antara lain:

Ternak Sapi

Alasan Penurunan populasinya pada tahun 2022 disebabkan beberapa Hal :

- Menurunnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi.
- Beralihnya minat peternak sapi ke buruh bangunan karena pengasilan beternak sapi belum bisa menunjang pendapatan sehari hari karena tuntutan biaya hidup pada saat ini sangatlah besar
- Tidak adanya minat pemuda untuk terjun beternak sapi pada saat ini lebih banyak terjun bekerja ke sektor lain.
- Adanya larangan penggunaan lahan inpestor di daerah daerah pesisir untuk digunakan untuk beternak sapi.
- Masih adanya penyakit PMK yang menyerang ternak sapi.

Ternak Kerbau

- Belum populernya peternakan kerbau dikabupaten tabanan disamping harga bibit jauh lebih mahal dari sapi. Daging kerbau dikabupaten tabanan dipergunakan untuk upacara agama saja.
- Belum populernya konsumsi daging kerbau dikabupaten tabanan hanya baru di beberapa desa di kabupaten tabanan.
- Masih ada penyakit PMK yang menyang kerbau.

Ternak Ayam Petelur

Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan

- Harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga telur. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.
- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Ras Petelur Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Ayam Buras

Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan

- Harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup ayam. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.
- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Buras Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak itik

Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan

- Harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup Itik sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.
- Pemeliharaan itik bersekala besar tidak ada lagi karena memerlukan lahan luas dan bau masih menjadi permasalahan besar bagi peternak.
- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Itik Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Kuda

Adanya penurunan populasi kuda disebabkan karena

- Tidak populernya beternak kuda di masyarakat dan biaya yang diperlukan cukup tinggi.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan

kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani. Tahun 2022 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok wanita tani, gapoktan dan forum poktan dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, Rata-rata penyuluh membina poktan 18 poktan yang aktif (kisaran 16-20 poktan) Setiap penyuluh membina secara intensif 8 poktan untuk peningkatan kelas kemampuan kelompok (kisaran 5-10 poktan, ketentuan dari kemenpan) sehingga diperoleh target $8/18$ dikalikan $100\% = 44,44\%$ dibulatkan menjadi 45%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 45% sehingga persentase ketercapaian mencapai 100 persen.

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2022 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 97 %. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya programa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat

Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten mewakili ke untuk tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerjadinan pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian

- kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
 - g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
 - h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;

- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan..
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya usahanya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten; penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian.

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai "*stake holder*", maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensi dan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petani tanaman pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa

menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBD I, APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan container, N2 Cair, Inseminasi Kit, kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran. Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang

bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian adapun

Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura

11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil –hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Tabel 2.8 Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	
					Target	Rp APBD
		URUSAN PERTANIAN				32.431.577.600

Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	27.829.787.017	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
			Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	25.108.879.349
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 orang/bulan%	25.100.197.161
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0%	0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.682.188
			Administrasi Umum		100%	345.927.488

Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.573.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.145.296
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.684.875
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.064.515
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.638.250
	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	127.847.526
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	108.045.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	19.928.626
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	100%	325.110.451
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	325.110.451	

			Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Indikator: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.791.598.786
			Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.154.099
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	331.658.984
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.449.785.703
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	253.270.943
			Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	123.462.095
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	129.808.848
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10%	906.887.381

Pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian				
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		65%	769.008.069
			Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	200.000.000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	569.008.069
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		5 jenis	126.108.773
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0
				Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	126.108.773
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain		15 ekor	11.770.539
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah	15 ekor	11.770.539

				Kabupaten/Kota Lain		
				Indikator: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			10%	3.194.981.983
Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		58%	603.540.239
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	424.596.579
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Indikator: Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan		5 Unit	178.943.660
			Pembangunan Prasarana Pertanian		137 unit	2.591.441.744
			Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	82 unit	916.441.744
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	175.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	72 unit	800.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	14 unit	200.000.000

				Indikator: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	16 unit	
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	100.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	200.000.000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	200.000.000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			99%	250.543.125
Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapannya dan penerapannya penguasaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapannya penguasaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota		17000 ekor	208.000.406

			Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	10 Laporan	
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	208.000.406
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		140 dokumen	42.542.719
			Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	140 dokumen	42.542.719
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			60%	249.378.094
Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Indikator: Meningkatnya Kemampuan Kelompok	Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibangun oleh penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		39%	249.378.094
	Meningkatkan Kompetensi Penyuluh		Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	174.378.094

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	75.000.000
--	--	--	--	--	---------	------------

BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan tema pembangunan 2025 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” dan tema pembangunan daerah di tahun 2025 yaitu “ generasi milenial untuk pariwisata berkelanjutan”. Pemerintah pusat telah menetapkan 5 prioritas nasional yang sudah menjadi kewajiban daerah mendukung pencapaiannya. Adapun prioritas nasional tersebut antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Nawacita di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pangan, hasil nyatanya berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kurun tiga tahun sejak

2014, produksi padi, jagung, cabai, dan bawang merah terus meningkat. Di antara beberapa komoditas tersebut, yang semula impor, berbalik status menjadi ekspor. Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan yang telah ditempuh antara lain Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, refocusing anggaran pada komoditas pangan strategis dan infrastruktur pertanian, program UPSUS, bantuan benih pada lokasi yang tidak existing, pemberlakuan reward and punishment dalam pelaksanaan penganggaran, implementasi asuransi pertanian, dan penetapan HET dan HPP, juga termasuk pembentukan satgas pangan. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan swasembada, bahkan mengembangkannya pada komoditas potensial.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2021. Dimana visi Kementerian Pertanian yakni : “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani
- d. Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 -2021 yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015 – 2021 adalah :

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.
2. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu ha untuk menggantikan alih fungsi lahan

3. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi serta terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta ha.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tertuangdalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	2.1	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan
		2.2	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian
		2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan
		2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: RPJMD Kab. Tabanan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. menurut permendagri 54 Tahun 2010, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran dalam prioritas (Permendagri 54 Tahun 2010)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Target Kinerja 2025

Ditahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber dayamanusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2025 seperti yang di tampilkan pada

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025

PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
		100%	Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
		100%	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	65%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian
		5 jenis	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya

		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	58%	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
		137 unit	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	17000 ekor	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		140 dokumen	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	39%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas

4.2 Rencana Kerja Kegiatan 2025

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan

kegiatan yang direncanakan di tahun 2025 disampaikan pada berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANIAN KAB. TABANAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIODE RENS TRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENANG GJAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANIAN						30.863.576.592,00								31.065.658.502,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						30.863.576.592,00								31.065.658.502,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						30.863.576.592,00								31.065.658.502,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</i>	-			100 persen	23.928.000.000,00						-	23.921.638.250,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 persen	5.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN	

3.27.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	22.003.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	22.003.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				158 Orang/bulan	22.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENGHEMATAN BELANJA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		22.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	-			100 persen	249.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	252.638.250,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		1.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		3.638.250,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material															
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	85.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	-			100 persen	255.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	255.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	255.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		255.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	-			100 persen	1.260.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	1.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN ANDANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		0,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		1.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	-			100 persen	156.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	156.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				100 Unit	106.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		106.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	50.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan produksi pertanian</i>	-			10 %	927.500.000,00						-	927.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase penggunaan Sarana Pertanian</i>	-			65 %	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN

3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	125.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman															
			<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		0,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman															

			<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman															
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				4 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN ANDANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Jumlah Penyediaan benih/bibit</i>	-				15 ekor	502.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	502.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06.003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															

			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				15 Ekor	502.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		502.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan</i>	-			10 persen	5.523.076.592,00						-	5.772.020.252,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Persentase Penggunaan Prasarana Pertanian</i>	-			58 persen	396.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	464.943.660,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	286.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		286.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
			<i>Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan</i>				5 Unit	110.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		178.943.660,00	DINAS PERTANIAN

3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	-			137 unit	5.127.076.592,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	5.307.076.592,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
		<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				8 Unit	125.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN ANDANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				72 Unit	4.462.076.592,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN ANDANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		4.462.076.592,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				14 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														

			<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN ANDANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya															
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani															

			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				82 Unit	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	290.000.000,00					-	250.000.000,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>				10 Laporan	250.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan</i>	-			140 dokumen	40.000.000,00			-	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				140 Laporan	40.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		0,00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh</i>	-			60 persen	195.000.000,00						-	195.000.000,00	

3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Kelompok Tani, Subak dan Abian Binaan Yang Berhasil Meningkatkan Kelas</i>	-			39 %	195.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan	-	195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
		<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				10 Unit	75.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kab. Tabanan		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
J U M L A H								30.863.576.592,00								31.065.658.502,00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Ditahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1205/03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja atas program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi secara efektif dan berkelanjutan baik internal maupun eksternal dalam kebutuhan penyusunan dokumen dimaksud; dan
 - c. melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Desember 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS
KABUPATEN TABANAN,

PERTANIAN



I MADE SUBAGIA, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1205/03/HK/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
Pengarah : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
Ketua : Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan.
Anggota : Kabid pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS
KABUPATEN TABANAN,

PERTANIAN



I MADE SUBAGIA, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PERTANIAN

JALAN EKATIST AS WIDOTO II, NO. 100 B, T. TELUKPONDONG, JEMELY REJONG
Website: <http://www.kabupatentabanan.go.id> dan Email: info@kabupatentabanan.go.id
Kabupaten Tabanan

Tabanan, 4 Desember 2023

Kepada

Nomor : 520 / 15471/Sekret/ Distan
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pembahasan Rancangan Renja 2025

Yth. Kepala Bidang
Lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, maka diharapkan kehadiran saudara dengan membawa dokumen usulan kegiatan tahun 2025 pada:

Hari : Selasa, 5 Desember 2023
Jam : 09.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Distan

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

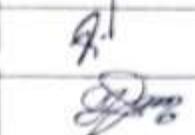
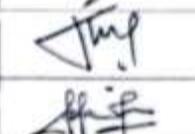
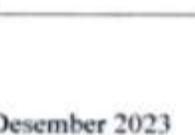
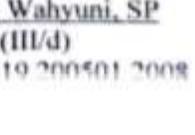


I Made Subagia S.Pi. MM
Pemangku Utama Muda IV/c
NIP. 19660308 198903 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Arrip

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Desember 2023
 Tempat : Ruang Rapat Diklat
 Pokok : Daftar Kehadiran Peserta Diklat 2023

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Made Subagia	Kadistan	
2	I Made Arya Puteh	Sekdes	
3	Kadek Pa Lita Ariani	Kabid PPTK	
4	Ali Muzaman Piniwan	Kabid RSP	
5	Sari Dewi Indrawati	Kabid Persekolahan	
6	I Ningsih Suadharjo	Kabid PPTK	
7	I Gst Ayu Sellen Oktavianti	Kabid Perkebunan	
8	Ni Putu Asri Wahyuni	Keb Umum & Keuangan	
9	Ni Putu Winda Istuti	JF perencanaan	
10			

Tabanan, 5 Desember 2023
 PPTK Kegiatan



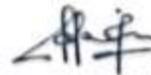
Ni Putu Asri Wahyuni, SP
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19740319 200501 2008

NOTULEN RAPAT

- Rapat : Rapat pembahasan Ranwal 2025
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Desember 2023
Jam : 09.00 s.d.12.00
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
- Rapat dibuka oleh : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Peserta Rapat :
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Sekretaris Dinas Kabupaten Tabanan
- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kepala Bidang Perkebunan
- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- Kepala Bidang Penyuluhan
- Analis Perencanaan
- Kasubag Umum dan Keuangan
Staf Perencanaan
- Hal yang dibahas :
- Capaian Kinerja
- Rencana kerja Tahun 2025
- Kesimpulan : Rencana kerja awal (Ranwal) tahun 2025 akan disusun berdasarkan hasil rapat dengan disesuaikan dengan renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Capaian kinerja yang dipergunakan adalah capaian kinerja tahun 2022

Demikian Notulen rapat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 5 Desember 2023
PPTK Kegiatan



Ni Putu Asri Wahyuni, SP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750319 200501 2008